



## JURNAL MANAJEMEN

Open access available at <http://ejournal.lmiimedan.net>



### **PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL (Studi Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Dairi)**

**May Sartika Tarigan, Arthur Simanjuntak, Duma Rahel Situmorang**  
Universitas Methodist Indonesia

#### **Info Artikel**

##### **Sejarah Artikel:**

Diterima Mei 2022

Disetujui Juni 2022

Dipublikasikan Juni 2022

##### **Keywords:**

*Organizational Commitment; Government Internal Control System; Human Resource Competence; Accrual-Based Government Accounting Standards*

#### **Abstract**

*This study aims to examine and analyze the effect of Organizational Commitment, Government Internal Control System (SPIP), and Human Resource Competence on the Application of Accrual-Based Government Accounting Standards at the Department of Industry, Trade, Cooperatives, and SMEs of Dairi Regency, in accordance with Government Regulation (PP) Number 71 of 2010 concerning Accrual-Based Government Accounting Standards which must be implemented comprehensively starting in 2015. This study uses a sampling method that is saturated sample, and data processing using multiple linear regression, F test and t test. This study uses primary data from questionnaires distributed to respondents. The results of this study indicate that partially organizational commitment and the government's internal control system (SPIP) have a positive and significant effect on the Application of Accrual-Based Government Accounting Standards at the Department of Industry, Trade, Cooperatives, and SMEs of Dairi Regency, while the competence of human resources has no effect on application of accrual-based accounting standards at the Department of Industry, Trade, Cooperatives, and SMEs of Dairi Regency. Simultaneously Organizational Commitment, Government Internal Control System (SPIP), and Human Resource Competence have a positive and significant impact on the Implementation of Accrual-Based Government Accounting Standards at the Department of Industry, Trade, Cooperatives, and SMEs of Dairi Regency.*

#### **PENDAHULUAN**

Banyak cara yang dilakukan Pemerintah Indonesia agar menciptakan *Good Governance* (tata kelola pemerintah yang baik) agar terciptanya akuntabilitass serta transparansi di bidang pengelolaan keuangan Negara (Simanjuntak et al., 2020). Salah satu upaya pemerintah adalah dengan membuat kebijakan akuntansi pemerintah yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dapat digunakan sebagai acuan dalam

penyajian laporan keuangan pemerintah (Siahaan & Simanjuntak, 2020). Standar akuntansi pemerintah yang dulunya masih berbasis kas menuju akrual yang di atur dalam PP No. 24 Tahun 2005, sudah diperbaharui dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010. Akuntansi pemerintah adalah sistem manajemen pengarsipan dan akuntansi yang harus diterapkan di semua negara. Standar Akuntansi Pemerintah ini pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan modal diakui dalam pelaporan keuangan berbasis finansial dan mengakui beban, pendapatan, serta pembiayaan dalam laporan pelaksanaan anggaran sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN).

Standar dan dibuat dengan mengacu pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah. Indonesia sendiri bahkan menetapkan penggunaan basis akrual secara penuh di tingkat undang-undang. Namun, pada kenyataannya, masih ada jalan panjang untuk mencapai tujuan tersebut. Pada tahun 2005, pemerintah mengeluarkan PP24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut PP 24/2005, Akuntansi Nasional Indonesia menggunakan basis kas menuju akrual, basis kas untuk mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, dan aset, kewajiban, dalam neraca menggunakan akuntansi akrual untuk mengakui. PP 24/2005 berlanjut hingga 2010, dan PP pengganti, atau PP 71/2010, diterbitkan. Tujuan memperkenalkan akuntansi akrual pada tahun 2008 telah tercapai.

Sebenarnya PP 71/2010 tidak langsung menghapuskan penerapan standar akuntansi yang digunakan dalam PP24/2005, karena Lampiran II PP71/2010 diturunkan dari isi Lampiran PP24/2005. Pemerintah mengakui akan membutuhkan waktu untuk mengubah model ke standar akuntansi baru, sehingga penggunaan standar akuntansi lama masih memerlukan landasan hukum. PP 71/2010 memungkinkan penerapan dasar perhitungan baru secara bertahap. Dalam Peraturan Pemerintah 71/2010 lampiran I, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) menyebutkan bahwa “lembaga pelaporan menyajikan laporan keuangan dan akuntansi sesuai dengan basis akrual untuk pengakuan pendapatan dan beban, serta pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas”. Lembaga pelapor yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan perundang-undangan tentang anggaran.”

Dari pernyataan tersebut, penggunaan akuntansi akrual penuh dari perspektif akuntansi keuangan diatur dalam PP 71/2010, sedangkan dari perspektif akuntansi anggaran ditunjukkan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan peraturan yang ada. Ini berarti bahwa rekening anggaran tidak harus didasarkan pada basis akrual. Saat ini, APBD dan APBN masih berbasis kas, dan pada basis yang sama realisasinya dicatat. Diharapkan dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual membuat kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah meningkat dan memberikan informasi yang lebih transparan dan akuntabel. Penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (akuntansi, penganggaran, pelaporan), pengelolaan pajak, pengelolaan aset, dan akuntabilitas dalam program pemerintah terkait dengan penyerahan barang dan jasa (Simanjuntak & Silitonga, 2020). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sitohang dan Kariono (2015),

tidak dipungkiri penggunaan sistem informasi keuangan daerah yang tidak terpadu di setiap daerah akan menciptakan masalah di daerah dalam penerapan Sistem Informasi Keuangan (SIKD) dalam dinamisasi regulasi dan penyusunan keuangan daerah oleh pemerintah pusat secara nasional. Penerapan akuntansi akrual pemerintah untuk wilayah pemerintah, yang menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah terdiri dari: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; g. Catatan atas laporan keuangan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Untuk tahun anggaran 2012 sampai tahun anggaran 2014 Pemerintah Kabupaten Dairi telah menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dengan menggunakan teknologi web yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Sejak tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Dairi telah mengimplementasikan penggunaan aplikasi keuangan SIMDA versia akrual. Sistem pengelolaan keuangan sebelumnya yaitu Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang dinilai tidak sesuai untuk pelaporan akuntabilitas pemangku kepentingan, auditor dan pemerintah pusat. Hal ini untuk memenuhi kewajiban Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberapa kali direvisi, dan terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Aturan tersebut mengatur setiap keperluan APBD dan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) maka SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) harus menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Pendelegasian Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Negara dan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Tetapi dalam implementasinya, terkait proses akuntansi, keterbatasan sumber daya manusia, dan infrastruktur yang ada masih merupakan kendala dalam sistem tersebut. dalam pengimplementasinya SIMDA akuntansi akrual versi 2.7 masih memiliki kendala, terutama terkait entri data Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Pemerintah Dairi, adalah input yang tidak sesuai dengan SK Bupati Dairi No. 910/. 561/XII/2016 tentang batas akhir pemasukan kode rekening anggaran dan data RKA untuk Pemerintah Kabupaten Dairi. Itu tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dairi (Pasi, Kadir dan Isnaini 2017).

Menurut hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atas pelaporan keuangan negara bagian (LKPD) pada tahun 2019, banyak catatan akuntansi yang tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah untuk masalah yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah, misalnya pada akun-akun dalam laporan keuangan yang kewajarannya tidak dapat diyakini dan keberadaanya tidak dapat di terlusiri.

Persentase permasalahan penyajian akun LKPD 2019 sesuai dengan SAP ada pada akun aset tetap karena nilai aset tetap daerah yang tidak akurat. Keberadaan aset tetap tidak yang diketahui dan tidak terbukti kepemilikan aset tersebut, dan tidak dilakukan inventarisasi aset tetap. Ketidakkonsistenan tampilan dengan SAP juga dapat dilihat pada saldo rekening saat ini. Hal ini dikarenakan saldo kas yang tidak ditampilkan sesuai SAP. Selain itu, inventaris tidak ditampilkan berdasarkan

pemeriksaan fisik dan tidak ada tanda terima yang dilampirkan. Selain itu, tagihan pajak bumi dan bangunan (PBBP2) daerah dan perkotaan belum sepenuhnya disahkan.

Indikator yang mungkin dapat mempengaruhi penerapan SAP berbasis akrual adalah komitmen organisasi. Komitmen merupakan dedikasi diri untuk mempertanggungjawabkan suatu pekerjaan. Menurut Wahyu dan Salam (2020), komitmen adalah sikap khusus pikiran dan hati yang memandu tindakan sesuai kesepakatan awal. Komitmen terhadap orang berasal dari rasa tanggung jawab terhadap sesuatu. Beberapa berkomitmen karena mereka menyukai apa yang mereka lakukan, sementara yang lain berkomitmen karena takut kehilangan sesuatu karena gagal memenuhi komitmen mereka. Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan. Semakin tinggi komitmen pemerintah dalam menjalankan misinya, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangannya.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) pemerintah juga merupakan indikator yang dapat mempengaruhi penerapan SAP berbasis akrual. Pengendalian internal adalah struktur organisasi, metode, dan sarana yang dirancang untuk menjaga kemakmuran perusahaan, dan tanggung jawabnya meliputi penyelidikan keakuratan laporan keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengelola manajemen yang ada oleh karyawan, termasuk memfasilitasi kepatuhan kebijakan (Mulyadi 2013:163).

Menurut pemeriksaan BPK atas 541 LKPD Tahun 2019 ditemukan 5.175 kelemahan SPI yang terdiri atas 1.108 (22%) permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern, pelaporan, 2.338 (45%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 1.729 (33%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi. Untuk meningkatkan keandalan Laporan Keuangan dan Kinerja, setiap Entitas Pelaporan dan Akuntansi wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern yang diatur dalam pasal 33 ayat 1 PP Nomor 8 Tahun 2006 ditekankan (IHPS, 2020). Dengan meningkatnya SPIP diharapkan pengendalian intern yang semakin efektif sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan, oleh karena itu pemerintah telah mengeluarkan PP No 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sumber Daya Manusia (SDM) juga indikator penting dalam penerapan SAP berbasis akrual. Kurangnya SDM yang berkualitas ialah salah satu masalah klasik dalam penerapan SAP berbasis akrual. SDM yang berkualitas dapat dilihat dari ilmu pengetahuan yang ia miliki, Ilmu pengetahuan tersebut didapatkan dari pendidikan dan pengalaman yang ditempuh. Supomo dan Nurhayati (2018) berpendapat bahwa salah satu aset penting bagi sebuah organisasi adalah sumber daya manusia. Perhatian dari berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk memaksimalkan kinerja guna mencapai tujuan bisnis. Oleh karena itu, diperlukan *talent management* yang baik untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi agensi. Sistem manajemen akuntansi dan laporan akuntansi berdasarkan standar akuntansi akrual memiliki kelemahan yaitu tidak memadainya sistem informasi akuntansi dan pelaporan serta kurangnya dukungan sistem informasi akuntansi dan pelaporan oleh staf yang sesuai (IHPS, 2020).

Sasaran survei ini adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Dairi. Memenuhi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang

---

Organisasi dan Fungsi Dinas dan Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Penjelasan Masing-masing Pekerjaan Kantor Wilayah Kabupaten Dairi.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal**

Keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi tertentu merupakan cerminan dari komitmen organisasi. Dengan kata lain, ini adalah sikap yang mencerminkan kinerja orang-orang di dalam organisasi dan proses berkelanjutan di mana anggota organisasi mengungkapkan keprihatinan tentang organisasi dan keberhasilannya. Mewakili kemajuan berkelanjutan untuk bertahan dalam organisasi (Muis, Jufrizen dan Fahmi, 2018). Seorang yang berkomitmen tinggi terhadap organisasi, dapat dikenali dengan ciri-ciri antara lain keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi dan kepercayaan yang kuat untuk bekerja demi organisasi. Oleh karena itu komitmen organisasi yang semakin tinggi akan berhibmas pada penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akruwal akan semakin baik.

Pegawai pemerintah yang sangat berkompeten meyakini bahwa organisasi adalah tempat bekerja dan tinggalnya akan memahami atau menghargai penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Berdasarkan penelitian Utami dan Silviana (2017), Oktavianti, Sigit, dan Sri (2017), dan Sitanggang (2021), hasil penelitian variabel komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan standar akuntansi berbasis akruwal. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang pertama yaitu:

H<sub>1</sub>: Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal.

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal.**

Pengendalian internal adalah kebijakan, proses, dan prosedur yang dikembangkan oleh manajemen untuk memastikan pelaporan keuangan yang andal dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kerangka akuntansi yang berlaku (Tuanakotta, 2014). Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang dilaksanakan secara menyeluruh pada lingkungan pemerintah sentra juga wilayah dikenal menjadi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pengertian sistem pengendalian intern merupakan proses yang integral dalam tindakan dan aktivitas yang dilakukan secara terus menerus sang pimpinan dan semua pegawai buat menaruh keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui aktivitas yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dijelaskan pada PP Nomor 60 tahun 2008 mengenai SPIP.

Untuk menyediakan laporan keuangan tanpa salah saji yang material, baik karena kecurangan atau kesalahan maka dibutuhkan pengendalian intern. Sistem Pengendalian

---

Intern Pemerintah (SPIP) cukup untuk menjamin efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pemerintah, perlindungan aset pemerintah, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern pemerintah dilaksanakan secara menyeluruh oleh pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, keberhasilan pengendalian internal mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual semakin baik.

Hasil penelitian dari Pasaribu (2016), Yulianto (2018), dan Sitanggang (2021) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang kedua yaitu:

H<sub>2</sub>: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

### **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual**

Menurut Suranjio, Nasruddin dan Paleni (2020), sumber daya manusia adalah satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, emosi, kemampuan, pengetahuan, dorongan, tenaga, rasa dan tujuan. Semua kemungkinan SDM ini mempengaruhi upaya organisasi untuk mencapai tujuannya. Menurut Edison, Anwar, dan Komariyah, 2017, kompetensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan benar dan memiliki manfaat berdasarkan masalah yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

Dalam rangka penyajian dan penyusunan laporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan standar akuntanis pemerintah berbasis akrual maka sumber daya manusia yang berkompeten dan memiliki pengetahuan dan keterampilan sangat dibutuhkan. Sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang tinggi adalah penyangga utama untuk dapat menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Agar terciptanya laporan keuangan yang sesuai dengan standar Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual maka pemerintah membutuhkan sumber daya manusia yang memadai.

Sejalan dengan hasil penelitian Pasaribu (2016), dan Sitanggang (2021) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual penerapan akuntansi berbasis akrual. Tingkat keandalan dan kualitas laporan keuangan akan semakin baik jika di dukung oleh sumber daya yang tinggi. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang ke tiga yaitu:

H<sub>3</sub>: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh Positif terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

---

## **Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal**

Penerapan standar akuntansi akrual pemerintah bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang posisi keuangan pemerintah. Dalam sistem akuntansi akrual, waktu pencatatan sesuai dengan waktu aliran sumber daya, dan seluruh aliran sumber daya dicatat, sehingga dapat memberikan informasi yang paling komprehensif. Hal tersebut didukung oleh sistem pengendalian intern pemerintah, kompetensi sumber daya, serta komitmen organisasi dalam mengelola keuangan daerah serta dapat dihasilkan laporan keuangan yang bertanggung jawab serta taat terhadap peraturan perundang-undangan atas penggunaan dana publik. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang keempat yaitu:

H<sub>4</sub>: Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Secara Simultan berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah hukum kuantitatif asosiatif, yaitu penelitian yang mengkaji hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2018) dan (Situmorang & Simanjuntak, 2019). Penelitian kausal adalah hubungan yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini mengkaji hubungan kausal antara variabel bebas dan variabel terikat. Ini juga dikenal sebagai penelitian kausal (Sugiyono, 2018) dan (Situmorang & Simanjuntak, 2021).

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer. Artinya, data yang peneliti kumpulkan langsung dari sumber aslinya. Data survei primer dikumpulkan melalui survei lapangan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Dairi. Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Dairi yang berjumlah 38 orang yang terdiri dari beberapa bidang. Dalam penelitian ini, metode pengambilan sampel adalah sampling jenuh, dengan menggunakan seluruh populasi sebagai sampel.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Komitmen Organisasi ( $X_1$ ), Sistem Pengendalian Intern pemerintah (SPIP) ( $X_2$ ), dan Kompetensi Sumber Daya Manusia ( $X_3$ ). Sedangkan variabel dependen adalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Bebas Akruwal (Y). Variabel ini diukur menggunakan kuesioner, dimana setiap variabel yang mengacu pada model *likert* sebanyak lima poin dengan skala pengukuran interval, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-ragu (RR), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS)

### **Analisis Data**

#### **Uji Kualitas Data**

Dalam penelitian ini untuk melihat sejauh mana alat ukur yang dipakai pada mengukur apa yang pada ukur maka dilakukan uji validitas. Ghazali (2018) menyatakan bahwa buat mengukur sah, atau valid tidaknya suatu berita umum maka dilakukan uji validitas

data. Setiap pernyataan (indikator) secara realitas dikatakan valid bila koefisien korelasi ( $r$ )  $> 0,50$ .

Reliabilitas atau *reliability test* adalah konsistensi dari seperangkat pengukuran atau seperangkat instrumen. Ini mungkin memberikan hasil yang sama dengan pengukuran dari perangkat yang sama (pengujian dengan pengujian berulang), tetapi pengukuran yang lebih subjektif tentang apakah dua evaluator melakukan penilaian yang sama (Dapat juga dilakukan sebagai reliabilitas antar-evaluator). Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan nilai Alpha Cronbach. Reliabilitas konsistensi internal secara empiris dapat diterima sebesar 0,70.

### Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal. Dasar penggunaan normal *probability plot* adalah sebagai berikut (Ghozali, 2018). Jika histogram menunjukkan pola distribusi normal mengikuti arah diagonal dan menyebar secara diagonal, atau jika data mengikuti arah diagonal dan menyebar secara diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2018). Jika garis histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, atau jika data jauh dari diagonal, atau tidak mengikuti arah diagonal, model regresi tidak dapat diasumsikan normal. Selain itu, uji statistik yang dapat digunakan adalah uji statistik nonparametrik Kolmogorov-Smirnov (KS) dengan nilai signifikan  $> 0,05$ , dan data residual berdistribusi normal.

Untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel bebas dari model regresi maka dilakukan Pengujian Multikolinieritas. Dalam model yang baik, tidak boleh ada korelasi yang tinggi antara variabel independen (Ghozali, 2018). Agar model regresi dapat mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas, toleransi harus kurang dari 0,10 ( $< 0,10$ ) dan nilai VIF harus lebih besar dari 10 ( $> 10$ ).

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji ketidaksamaan varians model regresi dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya (Ghozali, 2018). Jika varians residual tetap dari satu pengamatan ke pengamatan berikutnya, kita akan berbicara tentang homoskedastisitas, dan jika mereka berbeda, kita akan berbicara tentang heteroskedastisitas. Nilai dasar keputusan adalah perbandingan nilai tingkat kepercayaan ( $= 0,05$ ) dengan nilai sig variabel bebas menggunakan metode Glejser. Jika nilai sig  $>$  adalah 0,05 maka tidak ada gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

### Uji Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui arah hubungan positif atau negatif antara variabel bebas dan variabel terikat dan apakah nilai variabel terikat mengalami kenaikan atau penurunan. Regresi berganda dinyatakan dengan rumus berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + \varepsilon$$

**Keterangan :**

Y	= Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua
$\alpha$	= Konstanta
$\beta_1$	= Koefisien Regresi Komitmen Organisasi
$\beta_2$	= Koefisien Regresi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
$\beta_3$	= Koefisien Regresi Kompetensi Sumber Daya Manusia
$X_1$	= Komitmen Organisasi
$X_2$	= Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
$X_3$	= Kompetensi Sumber Daya Manusia
$\varepsilon$	= Kesalahan Residual ( <i>Error</i> )

**Uji Hipotesis Penelitian**

Untuk menguji hipotesis secara parsial untuk menunjukkan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen maka dilakukan uji t (Ghozali, 2018). Hipotesis diterima jika nilai probabilitas signifikansi < 0,05, dan Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau jika  $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ .

Uji statistic F secara umum menunjukkan bahwa komitmen organisasi, sistem pengendalian intern pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia, mempunyai pengaruh secara simultan terhadap penerapan standard akuntansi pemerintah berbasis akrual Penentuan penerimaan jika nilai signifikan <0,05. Koefisien determinasi pada dasarnya menunjukkan seberapa baik suatu model dapat menjelaskan variasi variabel dependen, Ghozali (2018). Jika  $R^2 = 1$ , berarti variabel independen yang menggambarkan variabel dependen memiliki kecocokan. Jika  $R^2 = 0$ , berarti tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****Statistik Deskriptif**

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada Tabel 1 di atas, maka uraian data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: variabel Komitmen Organisasi dengan sampel 38, nilai *minimum* 30, nilai *maximum* 50, dan *mean* (nilai rata-rata) sebesar 41.26, serta *Standard Deviation* atau simpangan baku sebesar 6.167. Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan sampel 38, nilai *minimum* 28, nilai *maximum* 50, dan *mean* (nilai rata-rata) sebesar 40.63, serta *Standard Deviation* atau simpangan baku sebesar 5.640. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan sampel 38, nilai *minimum* 30, nilai *maximum* 50, dan *mean* (nilai rata-rata) sebesar 40.63, serta *Standard Deviation* atau simpangan baku sebesar 6.639. Variabel Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua dengan sampel 38, nilai *minimum* 30, nilai *maximum* 50, dan *mean* (nilai rata-rata) sebesar 41.21, serta *Standard Deviation* atau simpangan baku sebesar 6.222.

Dari data di atas juga dapat dilihat bahwa  $mean > Standard Deviation$ , maka dapat di simpulkan bahwa data valid dan layak untuk digunakan.

**Tabel 1**  
**Hasil Statistik Deskriptif**

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Komitmen Organisasi	38	30	50	41.26	6.167
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	38	28	50	40.63	5.640
Kompetensi Sumber Daya Manusia	38	30	50	40.63	6.639
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua	38	30	50	41.21	6.222
Valid N (listwise)	38				

*Sumber : Data diolah dengan SPSS 25*

### Hasil Uji Validitas Data

Uji validitas dengan membandingkan nilai dari  $r_{hitung}$  dengan nilai dari  $r_{tabel}$ .  $R_{tabel}$  diperoleh dari perhitungan degree of freedom ( $df = n - 2$ ), dalam hal ini  $n$  adalah jumlah dari sampel penelitian. Besarnya nilai  $df$  dari penelitian ini dapat dihitung  $38 - 2$  atau  $df = 36$  dengan  $\alpha 0.05$  (5%) dan diperoleh  $r_{tabel}$  sebesar 0.3202. Dalam uji validitas variabel diketahui bahwa setiap pernyataan pada variabel independen komitmen organisasi, sistem pengendalian intern pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia serta variabel dependen penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual memiliki nilai  $r_{hitung} >$  dari  $r_{tabel}$  sebesar 0.3202, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa setiap pernyataan pada ketiga variabel independen dan variabel dependen tersebut dinyatakan valid.

### Hasil Uji Reliabilitas Data

Berdasarkan uji reliabilitas, diketahui bahwa item pernyataan pada variabel komitmen organisasi, sistem pengendalian intern pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia, serta variabel dependen penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual memiliki *Cronbach Alpha* memiliki nilai sebesar 0.927, 0.929, 0.964, dan 0.956  $>$  0.70. sehingga diperoleh kesimpulan bahwa variabel independen komitmen organisasi, sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia, serta variabel dependen penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dinyatakan reliabel.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Jumlah Item Pernyataan	Cronbach Alpha	Nilai Alpha	Keterangan
Komitmen Organisasi (X1)	10	0.927	0.70	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2)	10	0.929	0.70	Reliabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)	10	0.964	0.70	Reliabel
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (Y)	0	0.956	0.70	Reliabel

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25

### Hasil Uji Normalitas Data

**Tabel 3**  
**Kolmogorov – Smirnov Test One-Sample**  
**Kolmogorov-Smirnov Test**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		38
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.81997647
Most Extreme Differences	Absolute	.132
	Positive	.097
	Negative	-.132
Test Statistic		.132
Asymp. Sig. (2-tailed)		.094 <sup>c</sup>
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.492 <sup>d</sup>
	99% Confidence Interval	Lower Bound
	Upper Bound	.479
		.505

a. Test distribution is Normal.  
 b. Calculated from data.  
 c. Lilliefors Significance Correction.  
 d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25

Dari hasil uji normalitas pada Tabel 3, menunjukkan bahwa nilai *Monte Carlo Sig. (2-tailed)* sebesar 0.492 > 0.05, artinya data residual telah terdistribusi normal, sehingga telah dipenuhi asumsi dasar kenormalan.

### Hasil Uji Multikolinieritas

**Tabel 4 Hasil**  
**Uji Multikolinieritas**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Komitmen Organisasi	.324	3.084
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	.199	5.020
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	.150	6.655

a. Dependent Variable: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25

Dari uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai VIF variabel independen komitmen organisasi, sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai  $< 10$  dan memiliki nilai *tolerance*  $> 0.1$ , diperoleh kesimpulan bahwa variabel independen komitmen organisasi, sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia tidak mengalami masalah multikolinieritas.

### Hasil Uji Heterokedastisitas

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.195	2.738		1.897	.066
	Komitmen Organisasi	-.057	.100	-.166	-.565	.576
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	-.147	.140	-.394	-	.300
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	.123	.137	.385	.894	.377

a. Dependent Variable: Abs\_RES

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25

Dari hasil uji heteroskedastisitas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel independen komitmen organisasi, sistem pengendalian intern pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai masing-masing sebesar 0.576, 0.300 dan 0.377  $>$  alpha 0.05, ini menunjukkan bahwa data tidak mengalami masalah heteroskedastisitas atau data homoskedastisitas.

**Analisis Regresi Linier Berganda**

Pengujian ini dilakukan dengan pengujian data pada menggunakan *model multiple regression* (regresi berganda) dengan SPSS. Hasil dari pengujian regresi berganda disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 6 Hasil Uji Regresi Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.779	3.756		.207	.837
	Komitmen Organisasi	.382	.138	.379	2.777	.009
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	.459	.192	.416	2.391	.022
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	.147	.188	.157	.783	.439

a. Dependent Variable: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25

model persamaan regresi pada penelitian dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 0.779 + 0.382X_1 + 0.459X_2 + 0.147X_3 + \epsilon$$

**Uji Statistik t (Parsial)**

**Tabel 7 Hasil Uji T Parsial**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.779	3.756		.207	.837
	Komitmen Organisasi	.382	.138	.379	2.777	.009
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	.459	.192	.416	2.391	.022
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	.147	.188	.157	.783	.439

a. Dependent Variable: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25

Nilai  $t_{tabel}$  dengan derajat bebas (df) adalah  $df = n - k - 1 = 38 - 3 - 1 = 34$ , maka diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2.032

**Hasil Pengujian Hipotesis**

---

**H1: Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Dairi**

Pada Tabel 7 di atas nilai sig. variabel komitmen organisasi < nilai probabilitas kritis ( $\alpha = 5\%$ ) sebesar  $0.009 < 0.05$  dan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sebesar  $2.777 > 2.032$ ,  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima. Artinya komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pemerintah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Dairi. Jika semakin baik komitmen organisasinya sehingga dapat mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Dairi yang semakin baik.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Silviana (2017), Sigit dan Sri (2017), dan Sitanggung (2021) dimana variabel komitmen organisasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

**H2: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Dairi**

Pada tabel di atas dapat dilihat nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sebesar  $2.391 > 2.032$  dan nilai sig. variabel sistem pengendalian intern pemerintah < nilai probabilitas kritis ( $\alpha = 5\%$ ) sebesar  $0.022 < 0.05$ ,  $H_0$  ditolak  $H_2$  diterima. Artinya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pemerintah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Dairi. Nilai koefisien regresi linier juga menunjukkan arah yang positif, artinya sistem pengendalian intern pemerintah yang semakin baik, maka semakin baik pula penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi, dan UKM Kabupaten Dairi.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Pasaribu (2016), Yulianto (2018), dan Sitanggung (2021) dimana variabel sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

**H3: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Dairi**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  sebesar  $0.783 < 2.032$  dan nilai sig. dari variabel sistem pengendalian intern pemerintah > nilai probabilitas kritis ( $\alpha = 5\%$ ) sebesar  $0.439 > 0.05$  sehingga  $H_0$  diterima  $H_2$  ditolak. Artinya variabel Kompetensi sumber daya manusia secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Dairi. Dalam hal ini berdasarkan persepsi responden bahwa kompetensi sumber daya manusia untuk mewujudkan penerapan akuntansi basis akrual pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kabupaten Dairi belum nyata, dimana kebijakan untuk mendukung sarana dan prasarana yang memadai (bimtek, diklat, sosialisasi) belum optimal, dan ketersediaan anggaran yang cukup. Penelitian yang dilakukan oleh Purwaningrum (2017), dan Yulianto (2018) juga berpendapat bahwa kompetensi variabel sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan tidak menunjukkan peningkatan pada sistem akuntansi berbasis akrual.

**Hasil Uji Statistik F**

Untuk mencari  $F_{tabel}$  dengan taraf signifikansi 0.05 yaitu  $df = n-k-1 = 38-3-1 = 34$ , sehingga  $F_{tabel}$  adalah 2,883. Dari uji F yang telah dilakukan maka hasil disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Statistik F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1138.082	3	379.361	43.837	.000 <sup>b</sup>
	Residual	294.234	34	8.654		
	Total	1432.316	37			
a. Dependent Variable: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual						
b. Predictors: (Constant), Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah						

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25

Sesuai dengan hasil uji statistik F pada Tabel 8, maka:

**H4: Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Dairi.**

Nilai  $F_{hitung} >$  dari  $F_{tabel}$  yaitu  $2,883 > 2.90$  dan Nilai sig. F (Statistic) sebesar 0.000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05,  $H_0$  ditolak  $H_4$  diterima. Artinya Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Dairi.

**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Proporsi atau persentase kemampuan model guna menerangkan variabel yang terkait harus diukur menggunakan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ).

**Tabel 4.10**  
**Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.891 <sup>a</sup>	.795	.776	2.942	2.096
a. Predictors: (Constant), Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah					
b. Dependent Variable: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua					

*Sumber: Data diolah dengan SPSS 25*

Nilai *Adjusted R*<sup>2</sup> yang ditunjukkan pada tabel sebesar 0,795, dampak komitmen organisasi, sistem pengendalian intern pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrua pada pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Dairi dan sisanya 20,5% (100% -79,5%), dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pengujian yang dilakukan secara parsial dan simultan antara variabel independen dengan dependen merupakan tujuan dari penelitian ini. Kesimpulan dapat diambil berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Secara parsial hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.
2. Secara parsial hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.
3. Secara parsial hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.
4. Secara simultan hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.

## Saran

Sesuai dengan kesimpulan berikut beberapa saran penelitian yang diberikan:

1. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrua.
2. Untuk peneliti selanjutnya, jumlah variabel independen lainnya dapat ditambahkan atau diganti untuk mengetahui dampaknya terhadap penerapan standar akuntansi akrua, serta lebih banyak responden akan digunakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2020*: Jakarta.
- Edison, E., Anwar, Y., & Komariyah, I. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alfabeta, Bandung.
- Ghozali, Imam, 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IMB SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muis, M. R., Jufrizen, J., & Fahmi, M. (2018). Pengaruh budaya organisasi dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 1(1), 9-25.
- Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Salemba Empat, Jakarta.
- Oktavianti, L., Sigit, N., & Sri, W. (2017). Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi dan Ketersediaan Infrastruktur terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua di Kabupaten Bengkulu Tengah (*Doctoral dissertation, Universitas Bengkulu*).
- Pasaribu, L. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Akuntansi Basis Akrua dengan pengendalian Intern Akuntansi sebagai Variabel Intervening pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Humbang Hasundutan.
- Pasi, N., Kadir, A., & Isnaini, I. (2017). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan Berbasis Akrua pada Pemerintah Kabupaten Dairi. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 7(1), 49-63.
- Peraturan Bupati Dairi no 15 tahun 2008 *tentang tugas pokok dan uraian tugas-tugas tiap jabatan pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dairi*.
- Peraturan Daerah (PERDA) No. 05 Tahun 2008 *tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dairi*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. *Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. *Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2013 *tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 *Tentang Standar akuntansi pemerintahan.* Lembaran Negara RI Tahun 2005. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 *Tentang Standar akuntansi pemerintahan.* Lembaran Negara RI Tahun 2010. Sekretariat Negara. Jakarta.

Purwaningrum, Idha. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali). *Skripsi. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.*

Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 *Tentang Sistem Pengendalian Intern.* Lembaran Negara RI Tahun 2008. Sekretariat Negara. Jakarta.

Siahaan, S. B., & Simanjuntak, A. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pemahaman Standar Aakuntansi Pemerintahan, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu Ut. *JURNAL MANAJEMEN Open*, 6(2), 129–138. [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=AjAyn0AAAAJ&citation\\_for\\_view=AjAyn0AAAAJ:4T0pqqG69KYC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=AjAyn0AAAAJ&citation_for_view=AjAyn0AAAAJ:4T0pqqG69KYC)

Simanjuntak, A., & Silitonga, I. (2020). Pengaruh Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk Peningkatan Kualitas Perencanaan Partisipatif Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat). *Methosika: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 3(2), 97–112. <https://doi.org/10.46880/jsika.v3i2.43>

Simanjuntak, A., Situmorang, C. V., & Elisabeth, D. M. (2020). Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)*, 9(2), 131–142. <https://doi.org/10.34010/jika.v9i2.2985>

- 
- Situmorang, C. V., & Simanjuntak, A. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(2), 160. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i2.2694>
- Situmorang, C. V., & Simanjuntak, A. (2021). Pengaruh Strategic Management Accounting dalam Memediasi Pengaruh Orientasi Pasar, dan Kualitas Pimpinan terhadap Kinerja Keuangan. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 7(2), 100–108. <https://doi.org/10.31289/jab.v7i2.4312>
- Sitanggang, C. S. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Dinas Koperasi Dan Ukm Provinsi Sumatera Utara. *Skripsi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara*.
- Sitohang, R. S., & Kariono, K. (2015). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Dairi. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 5(2), 173-196.
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supomo, R., & Nurhayati, E. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*.
- Tuanakotta, Theodorus M. 2014. *Audit Berbasis ISA (Internasional Standards On Auditing)*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Utami, Dewi dan Silviana. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi dan Fungsi Komunikasi Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Bandung. *Jurnal Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice*.
- Wahyu, W., & Salam, R. (2020). *KOMITMEN ORGANISASI (Kajian: Manajemen Sumber Daya Manusia)*.
- Yulianto, Andika. 2018. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Studi Empiris Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset

---

Daerah Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.*

<https://www.bpk.go.id/ihps>

<https://portal.dairikab.go.id/profil-dinas-perindustrian-dan-perdagangan/>

<https://www.ipsasb.org/publications/study-14-transition-accrual-basis-accounting-guidance-governments-and-government-entities-third>